

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam Pengelolaan Drainase, yang dilihat menggunakan teori kinerja organisasi Stephen P. Robins yang meliputi pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sisten, pendekatan konstituen strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam melaksanakan program pengelolaan drainase belum cukup baik. Hal ini terlihat dari hampir semua indikator kinerja menurut Stephen P. Robins belum terpenuhi dengan baik di DPUTR Kabupaten Agam.

DPUTR Kabupaten Agam belum bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Karena kondisi drainase yang ada saat ini masih belum memadai dan bencana banjir masih sering terjadi, yang disebabkan karena pembangunan drainase yang masih belum menyeluruh dan kondisi drainase yang ada juga tidak terpelihara dengan baik. hal ini dikarenakan realisasi program selama ini kurang tepat sasaran, selain itu target program tersebut juga cukup kecil, dan DPUTR Kabupaten Agam juga mengalami kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Selain itu Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase juga belum memadai, dimana petugas dan dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan drainase belum memadai sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan drainase tidak bisa dilakukan secara

menyeluruh, koordinasi yang dilakukan DPUTR dengan pihak-pihak terkait juga belum terlalu baik karena kurangnya data yang diberikan oleh DPUTR, informasi yang hanya dilakukan secara lisan, terbatasnya keterlibatan organisasi lain, dan penyampaian informasi yang lambat.

Selanjutnya harapan dari masyarakat juga belum bisa terpenuhi oleh DPUTR karena kurangnya arahan dan keterbukaan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Selain itu masih banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai pengelolaan drainase ini.

DPUTR Kabupaten Agam juga belum bisa mencapai kriteria keberhasilannya, hal ini dapat dilihat dampak yang ditimbulkan terhadap semua aspek kehidupan masyarakat diantaranya terganggunya kesehatan masyarakat, terganggunya perekonomian masyarakat, terhambatnya pendidikan, terhambatnya kegiatan keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat yang terganggu. Terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut inovasi yang dilakukan oleh DPUTR dalam pengelolaan drainase diantaranya program master plan dan pemeliharaan drainase sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran terkait pengelolaan drainase yang dilakukan oleh DPUTR Kabupaten Agam diantaranya yaitu :

1. DPRD Kabupaten Agam, DPUTR Kabupaten Agam, Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung, dan Pemerintah Nagari dalam memilih dalam

mengusulkan dan memilih program dan kegiatan prioritas drainase dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan dan penilaian yang menyeluruh di setiap daerahnya.

2. DPUTR Kabupaten Agam dalam melakukan pembebasan lahan dapat dilakukan saat perencanaan anggaran untuk mengetahui apakah kegiatan bisa dilaksanakan atau tidak, dan jika tidak bisa dilaksanakan anggaran untuk kegiatan tersebut bisa dialihkan ke lokasi lain sehingga pembangunan dan pengembangan drainase bisa lebih cepat dilakukan.
3. DPUTR Kabupaten Agam dapat melakukan rekrutmen pegawai untuk petugas lapangan, perencana teknis, dan pengawas kegiatan.
4. DPUTR Kabupaten Agam dapat melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi drainase disekitar lingkungan mereka dan ikut serta dalam menjaga kebersihan drainase.
5. DPUTR Kabupaten Agam dapat menyediakan wadah yang dapat menampung keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat seperti website, call center, media sosial atau melalui suatu prosedur khusus yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan mengenai kondisi drainase di daerahnya.
6. DPUTR Kabupaten Agam dapat menetapkan jadwal-jadwal kegiatan pemeliharaan secara rutin untuk memantau sekaligus mencegah kerusakan dan luapan pada drainase.

7. Kepala Bidang Ekoprasil TR & LH BAPEDA Kabupaten Agam menyarankan agar pemilihan program dan kegiatan prioritas drainase dilakukan dengan mengutamakan usulan yang disampaikan oleh DPUTR Kabupaten Agam sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi drainase yang ada di Kabupaten Agam.
8. Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Antokan Agam menyarankan agar semua organisasi yang terkait dalam program pengelolaan drainase, sudah mulai dilibatkan oleh DPUTR Kabupaten Agam sejak dari perencanaan teknis untuk mencegah terjadinya permasalahan saat pelaksanaan kegiatan.
9. Wali Jorong Sago Nagari Manggopoh menyarankan agar DPUTR Kabupaten Agam untuk lebih terbuka dalam menerima laporan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai permasalahan drainase yang terjadi, untuk mempercepat penanganan drainase dan mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar.
10. Kepala Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Agam menyarankan agar masyarakat ikut terlibat dalam pemeliharaan drainase untuk menjaga kondisi drainase agar dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang lama.